

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERAPAN ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE

*Factors Affecting Budget Absorption at the Public Works Office of the
Parepare City*

JUMRIANI

E-mail : jumrianisemi@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

ABSTRACT

This study entitled “Analysis of Factors Affecting the Low Budget Absorption at the Public Works Office of the Parepare City”. This study aims to examine the effect of planning documents, administrative records, human resources, and inventory money on the absorption of the budget at the Public Works Office of the Parepare City. Data collection techniques used in this study is interviews, documentation and questionnaires. The population in this study was as crowded as employees at the Public Works Agency, which amounted to 60 respondents. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that planning documents, administrative records, human resources, and inventory money have a significant effect on budget absorption of 63.9% and the remaining 36.1% is influenced by other factors not included in this study. As for other factors that influence namely procurement documents, procurement of goods and services, regulations and factor tenders or auctions. Variables that have more influence on budget absorption are planning documents.

**Keywords : Planning Documents, Administration Records, Human Resources,
Inventory Money, and Budget Absorption**

PENDAHULUAN

Anggaran adalah instrumen kebijakan yang penting yang mencerminkan prioritas dan komitmen politik pemerintah, Satriyo dan Renosari (2008). Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyerapan anggaran di tanah air selalu saja menjadi persoalan yang terjadi setiap tahun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran negara. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus direalisasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia guna memberikan manfaat terhadap masyarakat. peran tersebut dapat terlaksana jika dilakukan secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya berdasarkan perencanaan pembangunan melalui APBD masih jauh dari harapan masyarakat terhadap pemerintah demi peningkatan kesejahteraan.

APBD 2017 Kota Parepare, telah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dengan harapan agar serapannya bisa dipercepat. Menurut Bustan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare mengatakan bahwa jumlah APBD tahun 2017 mencapai 1 triliun lebih. Seiring pencapaian serapan hingga bulan Mei 2017 menunjukkan tingkat penyerapan yang masih jauh dari semestinya, tingkat serapan belanja langsung hanya mencapai 8,51 persen atau kurang lebih 9 persen sementara belanja tidak langsung berada pada kisaran 13,22 persen. (Harian Parepos).

Data ini menunjukkan serapan menjelang semester I tahun 2017 masih sangat rendah. Keterlambatan serapan akan berakibat pada keterlambatan dan kualitas program kegiatan yang telah disusun dalam APBD.

Dari permasalahan tersebut dapat dikategorisasi beberapa hal terkait penyerapan anggaran diantaranya apakah dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, dan uang persediaan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

Anggaran

Menurut Bustami (2006:1), "Anggaran adalah Pernyataan-pernyataan dari kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistimatis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang".

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah".

Menurut Halim ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang di pisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investaris milik daerah. Keuangan daerah yang di pisahkan meliputi Badan Milik Daerah (BUMD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah yang menyusun rancangan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

APBD merupakan instrument kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah".

Penyerapan Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan (Bastian, 2006)

Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah di tetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal. Penentuan skala pengukuran dilakukan melalui kesepakatan daerah. Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum

memiliki definisi baku tentang nilai persentase suatu daerah yang tergolong rendah serapan anggaran APBD-nya. Namun ada beberapa daerah memiliki Perjanjian Kinerja (PK) yang di tandatangani oleh Kepala Daerah dengan pimpinan SKPD yang menyetujui suatu Pemda dinyatakan rendah serapan anggarannya apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kuantitatif, dimana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan dan diolah dalam rumus statistik Regresi Linear Berganda. dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear

Peneliti menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Adapun analisis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Regresi Linear Berganda dengan SPSS 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 dengan 60 item pertanyaan, adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel

No	r Hitung	r Tabel	Kriteria
Dokumen Perencanaan (X1)			
1	0.921	0.266	Valid
2	0.791	0.266	Valid
3	0.719	0.266	Valid
4	0.672	0.266	Valid
Pencatatan Administrasi (X2)			
1	0.835	0.266	Valid
2	0.800	0.266	Valid
3	0.830	0.266	Valid
4	0.783	0.266	Valid
5	0.784	0.266	Valid
Sumber Daya Manusia (X3)			
1	0.886	0.266	Valid
2	0.836	0.266	Valid
3	0.759	0.266	Valid
Uang Persediaan (X4)			
1	0.904	0.266	Valid
2	0.907	0.266	Valid
3	0.453	0.266	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2018

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung >0.266 r tabel berdasarkan uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item pada table 4.9 dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil perhitungan validitas variabel Y adalah Penyerapan Anggaran. dengan 60 item pertanyaan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel

No	r Hitung	r Tabel	Kriteria
Penyerapan Anggaran (Y)			
1	0.871	0.266	Valid
2	0.817	0.266	Valid
3	0.804	0.266	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2018

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung >0.266r tabel berdasarkan uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item pada table 4.10 dinyatakan valid.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, jika data yang diperoleh itu terdistribusi normal dan variasinya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik parametrik, berikut hasil uji normalitas dengan bantuan program spss 23 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
Uji normslitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	10.0666667
	Std. Deviation	1.27535663
Most Extreme Differences	Absolute	.152
	Positive	.152
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		1.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2018

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan untuk semua variabel lebih besar dari pada 0.05 dilihat dari hasil pengelolaan didapatkan nilai Signifikan 0.125, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis regresi linear berganda. X1 adalah dokumen perencanaan, X2 adalah pencatatan administrasi, X3 adalah sumber daya manusia, X4 Uang persediaan. Dan Y adalah Penyerapan Anggaran. Persamaan umum regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,491	,428		-1,146	,257
Dokumen Perencanaan	,460	,103	,394	4,460	,000
Pencatatan Administrasi	,277	,095	,258	2,929	,005
Sumber Daya Manusia	,154	,073	,187	2,103	,040
Uang Persediaan	,271	,071	,331	3,818	,000

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2018

$$Y = -0,491 + 0,460 X_1 + 0,277 X_2 + 0,154 X_3 + 0,271 X_4$$

Berdasarkan persamaan umum diatas, memperlihatkan bahwa koefisien regresi linear berganda bertanda positif. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan jika dokumen perencanaan ditingkatkan sebesar 0,460 atau 46% maka akan meningkat penyerapan anggaran sebesar satu satuan, pencatatan administrasi ditingkatkan sebesar 0,277 atau 27,7% maka akan meningkat penyerapan anggaran sebesar satu satuan, sumber daya manusia ditingkatkan sebesar 0,154 atau 15,4% maka akan meningkat penyerapan anggaran sebesar satu satuan, uang persediaan ditingkatkan sebesar 0,271 atau 27,1% maka akan meningkat penyerapan anggaran sebesar satu satuan.

Sedangkan jika semua variabel bebas diabaikan, maka penyerapan anggaran akan mengalami penurunan sebagaimana yang ditunjukkan dalam persamaan umum di atas $Y = -0,491$.

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang di ajukan adalah :

Dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, dan uang persediaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, dan uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh nilai 0,799 atau 79% dengan tingkat signifikansi

0,00 ($0,00 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima.

Tabel 5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.799 ^a	,639	,613	,36591	,639	24,340	4	55	,000	1,512

a. Predictors: (Constant), Uang Persediaan, Sumber Daya Manusia, Pencatatan Administrasi, Dokumen Perencanaan

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,639 (63,9%) yang menunjukkan determinasi pengaruh dokumen perencanaan, pencatatan

administrasi, sumber daya manusia, dan uang persediaan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran sedangkan 36,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu dokumen pengadaan, pengadaan barang dan jasa, regulasi serta faktor tender atau lelang.

Dari hasil olah data primer menjelaskan bahwa dokumen perencanaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$) dan nilai $t = 4,460$.

Selanjutnya variabel pencatatan administrasi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, tingkat signifikan sumber daya manusia sebesar 0,040 ($0,040 < 0,05$) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, tingkat signifikan uang persediaan sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai $t = 3,818$.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan lebih berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

B. Pembahasan

1. Dari hasil olah data primer menjelaskan bahwa dokumen perencanaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$) dan nilai $t = 4,460$ dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dokumen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.
2. Pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran berpengaruh signifikan dilihat dari variabel pencatatan administrasi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dari variabel pencatatan administrasi menunjukkan pengaruh yang bahwa proses-proses administrasi mengalami hambatan birokrasi sehingga memperlambat waktu pencairan anggaran. Oleh karena itu faktor pencatatan administrasi lebih disebabkan kepada alur kerja dan mekanisme operasional pemerintah.
3. Hal ini disebabkan salah dalam salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran dan masa penyusunan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung serta verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan mekanisme pembayaran.
4. Variabel sumber daya manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam meningkatkan penyerapan anggaran diperlukan kompetensi sumber daya manusia agar program pada Dinas Pekerjaan Umum dapat berjalan efektif dan efisien demi meningkatkan manfaat dari sebuah kegiatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula penyerapan anggarannya.
5. Dari hasil olah data primer menjelaskan bahwa sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat signifikan ialah sebesar 0,040 ($0,040 < 0,05$) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
6. Variabel uang persediaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terlihat dari jawaban responden yang menghasilkan uang persediaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Faktor tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada kuesioner yang diberikan yaitu dimana kegiatan sudah dilaksanakan dengan uang persediaan tetapi belum diganti melalui ganti uang persediaan.
7. Berdasarkan penjelasan masing – masing variabel diatas dapat diketahui bahwa diantara variabel dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia dan uang persediaan semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, namun diantara ke empat variabel tersebut terdapat satu variabel yang paling berpengaruh yaitu variabel dokumen perencanaan dengan nilai t tertinggi yaitu 4,460.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Serapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan, Pencatatan administrasi, Sumber daya manusia, dan Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh nilai R (79%) dengan tingkat signifikan 0,00 ($0,00 < 0,05$) yang diajukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima.
2. Dokumen perencanaan sebesar 0,000 atau 0% dengan nilai $t = 4,460$ atau 4,6% berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pencatatan administrasi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 atau 0,5% berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sumber daya manusia sebesar 0,040 atau 0,4% berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, uang persediaan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau 0% berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai $t = 3,818$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Adrianus Ds, atal. (2010) *Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian / lembaga tahun 2010*
- Alfrit Daud, Elimanafe.(2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Rote Ndao. Tesis*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Arif, E.& Halim, A. (2013). *Identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau tahun 2011*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI
- Budimanta, Arif. dkk. 2008. *Corporate Sosial Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Djarwanto. 2002. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF.
- Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. *Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur*: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.
- Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri*.Tesis (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gajah Mada.
- Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. BPKP, 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta



Martono, Nanang, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder. Ed. Revisi-2*, Jakarta: Rajawali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.